

Judul : Kementan perbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi
Tanggal : Jumat, 04 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 6

Kementan Perbaiki Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Strategi itu akan diterapkan guna mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan dan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

"Perbaikan tersebut kami lakukan, pertama, adalah petani penerima subsidi adalah petani yang mengusahakan lahan kurang dari dua hektare," kata Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (3/2).

Kemudian, pemberian pupuk bersubsidi berdasarkan pemilihan komoditas prioritas kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak pada inflasi. Jenis pupuk yang difasilitasi dalam program pupuk bersubsidi, yaitu urea dan NPK.

"Keempat, melakukan usulan penambahan anggaran karena memang sejak awal kita menyadari anggarannya kurang dari kebutuhan yang ada," ujar Kasdi.

Selain untuk menambah alokasi pupuk, anggaran tambahan akan dimanfaatkan untuk pengembangan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia.

Kementan juga akan menyempurnakan mekanisme pendataan penerima pupuk bersubsidi. Sebelumnya, Kementan sudah menerima rekomendasi dari Komisi IV DPR untuk memperbaiki pengumpulan data e-RDKK.

Perbaikan tata kelola penyaluran juga dilakukan dengan turut terlibat di dalam penataan penetapan distributor ataupun pengecer. "Sehingga, Kementerian Pertanian juga memiliki peluang kendali distribusi pupuk di lapangan," kata Kasdi.

Kementan mengemukakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani pada 2021 mencapai 7,76 juta ton dari total yang dialokasikan sebanyak 8,78 juta ton atau terealisasi sebanyak 88,45 persen. Nilai pupuk bersubsidi yang dibayarkan oleh Kementan pada 2021 mencapai Rp 27 triliun. Pada 2022, anggaran menurun dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 25,28 triliun.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menerapkan sistem digital untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi mulai dari pabrik hingga ke kios. Hal itu diterapkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan di lapangan.

"Kami juga berinisiatif membangun sistem digital dalam me-

monitor stok dari pabrik sampai distributor," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman.

Bakir mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Menurut dia, tanpa suatu sistem yang baik, masalah pendistribusian pupuk subsidi tidak akan selesai.

Bakir menyebut, sistem digital yang sedang dibangun akan melingkupi pabrik di lini I, gudang lini II, dan gudang lini III. Sistem aplikasi gudang, yakni *system application and processing (SAP)* telah terintegrasi dalam *distribution planning and control system (DPCS)*.

"Yang belum ada, tapi sudah selesai programnya adalah dari gudang distributor kepada kios di lini IV. Ini belum diimplementasikan untuk pupuk subsidi, namun untuk kios nonsubsidi kami akan implementasikan segera," kata Bakir.

Bakir berharap dengan adanya sistem digital ini dapat mendeteksi apabila ada kebocoran stok pupuk. Pupuk Indonesia juga memiliki *retail management system (RMS)* yang digunakan oleh kios. Sistem tersebut mencatat tanggal kedatangan pupuk serta tanggal pengambilan pupuk oleh petani.

■ Antara ed: ahmad fikri noor